FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Gunungkidul)

Vidya Vitta Adhivinna, Ariyanti Nurul Hikmahwati,

Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta

adhivinna@upy.ac.id

nurulhikmahwati25@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of competency of human resources, utilization of information technology, government internal control system, and regional financial accounting system on the information quality of local government financial statement.

Data was collected by distributing questionnaires to 28 regional government organization of Gunungkidul Regency. Sampling using a Purposive Sampling technique with criteria is employees who work in the accounting or financial administration with respondents are 72 people. Data were analyzed using SPSS program version 16 and hypothesis testing using multiple linear regression analysis.

The results showed that partially, human resource competency, utilization of information technology and government internal control system did not affect the information quality of local government financial statement, while the regional financial accounting system affected the information quality of local government financial statement. Simultaneously, HR competency, utilization of IT, government internal control system, and regional financial accounting system affect the information quality of local government financial statement.

Keywords: *information quality of local government financial statement, human resource competency, utilization of IT, government internal control system, and regional financial accounting system.*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan variabel kompetensi SDM, pemanfaatan TI, SPIP, dan SAKD terhadap kualitas informasi LKPD.

Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 28 OPD Kabupaten Gunungkidul. Sampel diambil dengan teknik *Purposive Sampling*, kriterianya adalah pegawai yang bekerja di bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan dengan responden sebanyak 72 orang. Data dianalisis menggunakan program SPSS versi 16 dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, kompetensi SDM, pemanfaatan TI dan SPIP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD, sementara SAKD berpengaruh terhadap kualitas informasi LKPD. Secara simultan, kompetensi SDM, pemanfaatan TI, SPIP, dan SAKD memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD.

Kata kunci : kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi SDM, pemanfaatan TI, sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, bila informasi yang ada dalam LKPD sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan yang mengacu pada PP No 71 Tahun 2010 (Rahmawati dkk, 2018). Berdasarkan data dari IHPS I tahun 2018 BPK RI, Kabupaten Gunungkidul mengalami

peningkatan opini dari tahun 2014 menuju 2015. Tahun 2014 diperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian tahun 2015 – 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian opini WTP menunjukkan bahwa penyajian dan pengungkapan LKPD Kabupaten Gunungkidul adalah wajar.

Upaya untuk mewujudkan *good governance* harus diimbangi dengan SDM yang kompeten dalam mengelola keuangan daerah. Telah menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah, dalam penataan personilnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (Inapty dan Martiningsih, 2016). Pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang terbatas, menjadikan kurangnya pemahaman atau kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang benar (Andini dan Yusrawati, 2015).

Pemerintah Daerah melalui PP No 65 tahun 2010 diwajibkan untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan kecanggihan TI untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta menyediakan informasi keuangan kepada pelayanan publik (Rahmadani, 2015). Namun, jika pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu atau belum optimal, penerapan teknologi akan menjadi sia-sia dan mahal, karena membutuhkan biaya banyak (Wansyah dkk, 2012).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) berfungsi untuk memberi keyakinan memadai atas terwujudnya efektifitas dan efisiensi proses akuntansi terlebih dalam menghasilkan informasi laporan keuangan yang andal. Reliabilitas, objektivitas informasi

dapat ditingkatkan dengan SPI dan SPI mampu mencegah ketidakkonsistenan serta proses audit laporan keuangan menjadi mudah (Mahaputra dan Putra, 2014). Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai 3,08 atau berada di tingkat 4 (terdefinisi) yang artinya praktik pengendalian intern di Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik, namun pengendalian intern dievaluasi tanpa dokumentasi yang memadai. Nilai yang diperoleh Kabupaten Gunungkidul menempati urutan terbawah di wilayah DIY (Lap. Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2017 BPKP DIY).

LKPD dihasilkan oleh SAKD. Secara konsep, penerapan sistem akuntansi yang baik, akan menghasilkan LKPD yang berkualitas ditandai dengan minimalnya kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidakpatuhan pada hukum dan diwujudkan dengan opini dari BPK serta memenuhi karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan (Patra dkk, 2015).

Penelitian ini adalah replikasi penelitian Nurillah (2014). Perbedaan hasil penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan TI, SPIP, dan SAKD.

LANDASAN TEORI

Laporan keuangan sektor publik yaitu representasi posisi keuangan dari aktivitas transaksi entitas sektor publik. Pelaporan keuangan bertujuan umum menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang digunakan oleh sebagian besar pemakai untuk mengambil dan menilai keputusan terkait alokasi sumber daya yang digunakan entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan (Bastian, 2015).

Kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, berwujud pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Permendagri No 2 Th 2013).

Komputer, *software*, basis data, dan jenis lainnya termasuk dalam teknologi informasi. Tladalah teknologi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan data, termasuk mendapatkan, pemrosesan, penyusunan, penyimpanan dan pemanipulasian dengan berbagai cara untuk menyediakan informasi yang berkualitas dan strategis untuk pengambilan keputusan (Setyowati dkk, 2016).

"Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan". (PP No 60 Th 2008).

Berdasarkan Permendagri No 59 Th 2007, sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

METODE PENELITIAN

1. Variabel Penelitian

Variabel independen :kompetensi SDM, pemanfaatan TI, SPIP, SAKD. Variabel dependen :kualitas informasi LKPD

2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi :seluruh pegawai OPD Kabupaten Gunungkidul. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria (1) Kepala bagian dan staff akuntansi (2) Kepala bagian

dan staff penatausahaan keuangan (3) Minimal menjabat satu tahun. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada 28 OPD Kabupaten Gunungkidul.

HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Data

OPD di Kabupaten Gunungkidul yang menjadi objek penelitian sebanyak 28 OPD yang terdiri dari 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 1 Satpol PP, 5 badan dan 19 dinas. Jumlah kuesioner yang disebar 112

buah (100%), tidak kembali 8 buah (7,14%), kuesioner yang dapat diolah untuk dianalisis 72 buah (64,29%), sisanya 32 (28,57%) kuesioner tidak dapat diolah.

Tabel 1 Karakteristik Responden

Data		Jml	Presentase
Jenis Kelamin	L	28	38,89 %
	P	44	61,11 %
Total		72	100%
Umur	20 – 30 th	5	6,94 %
	31 – 40 th	20	27,78 %
	41 – 50 th	24	33,33 %
	>50 th	23	31,95 %
Total		72	100%
Lama Waktu Kerja	1 – 5 th	14	19,45 %
	5 – 10 th	16	22,22 %
	>10 th	42	58,33 %
Total		72	100 %
Tingkat Pendidikan	SMA	11	15,28 %
	Diploma	9	12,50 %
	S1	41	56,94 %
	S2	11	15,28 %
Total		72	100%
Latar Belakang Pendidikan	Akuntansi	21	29,17%
	Manajemen	8	11,11%
	Ekonomi	13	18,05%
	SMA (IPS)	4	5,56%
	Lain-lain	26	36,11%
Total		72	100%

Sumber : data primer diolah, 2019

2. Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Kompetensi SDM (X_1)	72	23	35	29,58	3,029
Pemanfaatan TI (X_2)	72	24	30	26,75	2,342
SPIP (X_3)	72	12	25	21,15	2,180
SAKD (X_4)	72	30	40	35,10	3,255
Kualitas Informasi LKPD (Y)	72	30	40	34,58	3,103

Sumber : data primer diolah, 2019

3. Uji Kualitas Data

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel tingkat signifikasinya $< 0,05$, artinya dapat dikatakan bahwa semua item pada seluruh variabel adalah valid. Diketahui dari hasil uji reliabilitas

bahwa setiap variabel memiliki nilai *cronbach alpha* $> 0,70$, artinya pernyataan pada masing-masing variabel adalah reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolonearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi SDM (X_1)	0,362	2,762
Pemanfaatan TI (X_2)	0,330	3,027
SPIP (X_3)	0,390	2,565
SAKD (X_4)	0,265	3,770

Sumber : data primer diolah, 2019

b. Uji Heteroskedastisitas

Sumber : data primer diolah, 2019

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Grafik diatas menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik tidak menunjukkan pola yang jelas serta titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga

Menurut tabel 3, tidak ada variabel yang memiliki nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , artinya tidak terdapat multikolonearitas antar variabel bebas pada model regresi.

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Sumber : data primer diolah, 2019

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas (Grafik Normal Probability Plot)

Gambar diatas menunjukkan bahwa pada grafik histogram memberikan

pola distribusi normal, yaitu tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Dilihat dari grafik *normal probability plot* titik-

titiknya menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

5. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t	Sig.	Keterangan
KSDM	-0,084	-0,706	0,483	H ₁ : Ditolak
PTI	0,056	0,349	0,728	H ₂ : Ditolak
SPIP	-0,018	-0,113	0,910	H ₃ : Ditolak
SAKD	0,812	6,265	0,000	H ₄ : Diterima
Konstanta		7,439		
Adjusted R ²		0,651		
F		34,177 (Sig. = 0,000)		H ₅ : Diterima

Sumber : data primer diolah, 2019

Persamaan regresi dapat dirumuskan :

$$Y = 7,439 - 0,084 X_1 + 0,056 X_2 - 0,018 X_3 + 0,812 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Informasi LKPD

X₁ = Kompetensi SDM

X₂ = Pemanfaatan TI

X₃ = SPIP

X₄ = SAKD

Berikut penjelasan mengenai persamaan regresi linear berganda :

1. Konstanta (α) yang diperoleh 7,439 berarti tanpa ada pengaruh dari keempat variabel independen, variabel Kualitas Informasi LKPD sebesar 7,439 satuan.
2. Koefisien Kompetensi SDM (β_1) sebesar -0,084, berarti apabila terjadi kenaikan nilai variabel Kompetensi SDM sebesar 1 satuan, akan menurunkan Kualitas Informasi LKPD 0,084 satuan atau 8,4% dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien Pemanfaatan TI (β_2) sebesar 0,056, artinya apabila terjadi kenaikan variabel Pemanfaatan TI sebesar 1 satuan, akan menaikkan Kualitas Informasi LKPD 0,056 satuan atau 5,6% dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Koefisien SPIP (β_3) sebesar - 0,018, artinya apabila terjadi kenaikan variabel SPIP sebesar 1 satuan, akan menurunkan Kualitas Informasi LKPD 0,018 satuan atau 1,8% dengan asumsi variabel lain konstan.

5. Koefisien SAKD (β_4) sebesar 0,812, artinya apabila terjadi kenaikan variabel SAKD sebesar 1 satuan, akan menaikkan Kualitas Informasi LKPD 0,812 satuan atau 81,2% dengan asumsi variabel lain konstan.

6. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4 menunjukkan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,651, berarti variabel Kualitas Informasi LKPD dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen sebanyak 65,1% dan 34,9% dijelaskan oleh variabel lain.

7. Uji F

Tabel 4 menunjukkan nilai F hitung 34,177 yang signifikasinya 0,000 atau Sig. < 0,05, kesimpulannya H₅ diterima, yaitu Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI, SPIP, dan SAKD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Informasi LKPD.

8. Uji t

Berdasarkan tabel 4, uji statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kompetensi SDM (X₁) memiliki nilai signifikansi 0,483 > 0,05. Artinya H₀ diterima dan H₁ ditolak. Kesimpulan: Kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi LKPD.
2. Pemanfaatan TI (X₂) memiliki nilai signifikansi 0,728 > 0,05. Artinya H₀ diterima dan H₂ ditolak. Kesimpulan: Pemanfaatan TI tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi LKPD.

3. SPIP (X_3) memiliki nilai signifikansi $0,910 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_3 ditolak.

Kesimpulan: SPIP tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi LKPD.

4. SAKD (X_4) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_5 diterima.

Kesimpulan: SAKD berpengaruh terhadap Kualitas Informasi LKPD.

PEMBAHASAN

Berdasarkan uji hipotesis variabel kompetensi SDM diketahui bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, nilai signifikasinya lebih dari 0,05, artinya kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD Kab Gunungkidul. Dilihat dari data demografi responden, pegawai pengelolaan keuangan Kabupaten Gunungkidul sebagian besar merupakan lulusan S1, akan tetapi masih banyak pegawai pengelola keuangan yang berlatar belakang pendidikan bukan akuntansi dan presentasinya terbesar. Penempatan pegawai di pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, khususnya bagian pengelola keuangan masih belum disesuaikan dengan keahlian setiap individu, tidak semua pengelola keuangan berlatar belakang pendidikan akuntansi menyebabkan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi LKPD. Kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD juga disebabkan pegawai lebih mengutamakan dalam memanfaatkan TI, yaitu aplikasi SIMDA (Siwambudi, 2017). Penelitian ini sesuai penelitian Inapty dan Martiningsih (2016) yang menerangkan kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel pemanfaatan TI diketahui bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak, dimana nilai signifikasinya lebih dari 0,05, artinya pemanfaatan TI tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Gunungkidul. Penyebabnya adalah ketidaksesuaian penetapan sistem dengan apa yang diinginkan, sistem bermasalah dan penggunaanya merasa asing, oleh karena itu pengimplementasian sistem TI menjadi tidak bermanfaat dan

tidak menunjang keandalan penyajian laporan keuangan (Surastiani dan Handayani, 2015). Pada kenyataannya pemanfaatan TI di pemda belum sepenuhnya bisa menambah efektivitas dan efisiensi, memenuhi kebutuhan informasi dan meningkatkan kinerja aparatur pengelola keuangan dalam menyelesaikan pekerjaannya (Setyowati dkk, 2016). Penelitian ini sesuai penelitian Surastiani dan Handayani (2015) yang menerangkan pemanfaatan TI tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD.

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel SPIP diketahui bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak, artinya SPIP tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Gunungkidul. Buktinya dengan melihat hasil nilai signifikasinya yang lebih dari 0,05. Penjelasan, sistem pengendalian internal yang ditetapkan baik, akan tetapi penerapannya masih tidak efektif mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan informasinya kurang tepat (Yendrawati, 2013). SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi LKPD dikarenakan penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Gunungkidul belum efektif dan masih membutuhkan pendampingan. Hal itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Akuntabilitas Keuangan tahun 2017 bahwa pemda Kab. Gunungkidul telah melaksanakan praktik pengendalian dengan tingkat maturitas berada di tingkat 4 (terdefinisi) dengan skor maturitas 3,08 yang berada di urutan terakhir di Provinsi DIY. Pencapaian itu tidak lepas dari asistensi yang dilakukan oleh BPKP dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP. Penelitian ini sesuai penelitian Yendrawati (2013) dan

Yensi (2014) yang menerangkan sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi LKPD.

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel SAKD diketahui bahwa H_0 dan H_4 diterima, dimana nilai signifikasinya kurang dari 0,05, artinya SAKD berpengaruh terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Gunungkidul. Artinya penerapan SAKD yang semakin tinggi, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat. Pemerintah diharuskan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAKD yang diatur pemerintah daerah dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah yang bersifat mengikat, sehingga penerapan SAKD yang baik dan benar berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan (Mokoginta, 2017). Penelitian sejalan dengan penelitian Andini dan Yusrawati (2015), Rahmadani (2015) dan Alamsyah, dkk (2017) yang menunjukkan SAKD memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi F yaitu dibawah 0,05, sehingga H_5 diterima, artinya kompetensi SDM, pemanfaatan TI, SPIP, dan SAKD secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alamsyah, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa bertambahnya tinggi kompetensi SDM, pemanfaatan TI, SPIP, dan SAKD, kualitas informasi LKPD akan bertambah baik (Alamsyah dkk, 2017).

PENUTUP

Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, M R., Rahayu, S., dan Muslih, M. 2017. "Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah (SAKD),

Secara parsial kompetensi SDM, pemanfaatan TI dan SPIP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Gunungkidul, sedangkan SAKD memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Gunungkidul. Kompetensi SDM, pemanfaatan TI, SPIP, dan SAKD bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD Kabupaten Gunungkidul.

Saran

(1) Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel misalnya komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan (2) Penelitian selanjutnya diharapkan menambah metode dengan melakukan wawancara sehingga data yang didapatkan lebih kredibel (3) Data identitas responden dalam kuesioner sebaiknya dibuat secara jelas dengan memberikan kategori di setiap aspek, sehingga didapatkan data responden secara lebih jelas dan akurat.

Implikasi

1. Pemda Kabupaten Gunungkidul sebaiknya menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan masing-masing individu khususnya bagian pengelolaan keuangan agar meningkatkan kompetensi dan kinerja pengelola keuangan OPD.
2. Pemda Kabupaten Gunungkidul sebaiknya memanfaatkan secara optimal teknologi informasi (jaringan internet, *hardware* dan *software/aplikasi*) sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam menjalankan pekerjaan.
3. Pemda Kabupaten Gunungkidul sebaiknya melakukan perbaikan atas kelemahan pada praktik pengendalian internal sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan OPD.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD

- Kota Depok)". *Majalah Ilmiah UNIKOM*. 15(2): 201-210.
- Andini, D. dan Yusrawati. 2015. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan". *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 24(1): 65-82.
- As Syifa Nurillah. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)". *Diponegoro Journal of Accounting*. 3(2): 1-13.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2018. Melalui <http://www.bpk.go.id>. Diunduh tanggal 9 Oktober 2018.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta. 2017. Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2017. Melalui <http://www.bpkp.go.id>. Diunduh tanggal 4 Desember 2018.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Desy Sefri Yensi. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Sengingi)". *JOM FEKON*. 1 : 1-15.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Inapty, M A F B A., dan Martiningsih, S P. 2016. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. 9(1): 27-42.
- Mahaputra, I P U R., dan Putra, I W. 2014. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 8(2): 230-244.
- Mokoginta, N., Lambey, L., dan Pontoh, W. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12(2): 874-890.
- Patra, A D A., Bustami, L., dan Hasriani. 2015. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi*. 2(1): 1-9.
- Rahmawati, A., Mustika, I W., dan Eka, L H. 2018. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan". *Jurna Ekonomi, Bisnis dan Akuntani (JEBA)*. 20(2): 8-17.
- Reni Yendrawati. 2013. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Faktor Eksternal sebagai

Variabel Moderating". *JAAI*. 17(2): 166-175.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Setyowati, L., Isthika, W., dan Pratiwi, R D. 2016. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang". *Kinerja*. 20(2): 179-191.

Siwambudi, I G N., Yasa, G W., dan Badera, I D N. 2017. "Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 6(1) : 385-416.

Suci Rahmadani. 2015. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat)". *Jom FEKON*. 2(2): 1-15.

Surastiani, D P. dan Handayani, B D. 2015. "Analisis Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 7(2): 139-149.